

PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Azza Nur Laila
2101031

JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Azza Nur Laila
NIM: 2101031

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Azza Nur Laila
Nomor Induk : 2101031
Judul : Perkawinan Antar Anggota Keluarga
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Achmad Arif budiman M.Ag
NIP. 150 274 615

Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 150 290 920



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Azza Nur Laila

Nomor Induk : 2101031

Judul : PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA
(Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kudus)

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus
dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal:

29 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana
Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Semarang, 27 Januari 2005

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Nur Huda, M.Ag.

NIP. 150 267 757

Penguji I

Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 290 920

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 150 276 114

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si

NIP. 150 263 235

Pembimbing II

Achmad Arif budiman M.Ag

NIP. 150 274 615

Ahmad Izzuddin, M.Ag

NIP. 150 290 920

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (Qs. Ar-Rum : 21)

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2006

Deklarator,

Azza Nur Laila

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Gusti Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan (*syafa'at al'udhma*) di hari akhir (kiamat) nanti. *Amien*.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)” tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak A. Arif Budiman selaku pembimbing I dan Bpk Ahmad Izzuddin M.Ag selaku pembimbing II.
4. Bapak Drs. Eman Sulaeman, M. Hum., selaku ketua jurusan Al-Akhwalus Syakhsiyah.
5. Segenap Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
6. Bapak puji eling susilohadi, S. Sos. Selaku Camat Kaliwungu, Bapak Eko Tachwoyo, SH. MM selaku Kepala Seksi Pemerintahan yang telah banyak

membantu penulis dalam memperoleh informasi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

7. Ayah dan Ibu, yang dengan segala ketabahan dan kesabarannya memberikan pendidikan pada penulis dengan segala pengorbanan baik materiil maupun immaterial demi kesuksesan penulis tentunya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Semarang, 10 Oktober 2006

Penulis

Azza Nur Laila
2101031

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati
Kupersembahkan dan kuhadiahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi
arti dalam perjalanan hidupku:*

- Fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi banyak pelajaran dan ilmu.
- Ayah dan Ibuku tercinta (Bapak Ahmad Musyafa' dan Ibu Istiqomah) yang telah mendidik dan membesarkan aku dengan ikhlas, sabar, dan kasih sayang yang tiada dapat aku membalasnya kecuali dengan baktiku padamu .dan selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anaknya daripada kepentingan sendiri. dari beliau aku tau akan arti kehidupan, dari beliau pula aku selalu mendapatkan semangat dan jiwa agar tidak mudah putus asa dan pantang menyerah dalam kehidupan maupun dalam menggapai cita-cita. Semua takkan kami balas selama hidup kami, kecuali do'a yang selalu terucap dalam bibirku "Ampunilah semua dosa mereka berdua, terimalah semua amal baiknya, berilah umur panjang agar selalu dijalanmu, rizki yang halal dan barokah serta lindungilah mereka selalu didunia dan akhirat. Amin.
- Adikku tercinta, Izzudin dan Nailus Sa'adah yang selalu memberi aku motifasi dan semangat untuk keberhasilanku dalam menggapai cita-cita dan juga kasih sayang yang takkan kulupa walau mungkin kadang kita bertengkar karena beda pendapat menunjukkan bahwa Dunia memang penuh warna,, Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah dan bahagia dunia akhirat, tercapai apg yang kamu cita-citakan. Dan tak lupa adik sekaligus keponakan kecilku yang selalu mengisi hari-hariku dirumah dengan tangisan dan tawamu (Nadine Asfia Mardatillah) Semoga kamu selalu panjang umur, dilindungi Allah, tambah pintar.
- Tak lupa keluarga pak De Mat di Kudus, keponakan-keponakanmu yang aku sayangi, Om Adi sekeluarga yang telah menjadi orang tuaku selama di Semarang, dan keluarga besarku di Pati yang tak bisa aku sebutkan satu persatu.
- Yang telah memberi aku motifasi dan semangat, inspirasi, temanku saat suka dan duka i-one, mbak idha semua keluarga di Kudus, terima kasih banyak telah ada dalam hari-hariku.
- Keluarga besar UKM Musik dan PSM Walisongo, Indonesian Moslem Choir, Samsul, Tomy, mbak Mala, Kek Jarot sekalian, Mas Ipank, Kek Dul sek, Cak Iwan Buana fr, PSM Jogja, Jakarta, cah-cah angkatan 2001, Kos ilham bintang dan kawan-kawanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, tank'S UNTUK MOTIFASI, PENGALAMAN DAN SEMANGATNYA, Tanpamu hidup takkan indah Ini adalah sebagian perjuangan dan cita-cita.

Dan pada akhirnya

*Kupersembahkan karya sederhana ini Untuk segala ketulusan kalian semua
Semoga apa yang telah menjadi harapan kan jadi kenyataan
Amien*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II : PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan menurut hukum adat	
1. Pengertian perkawinan adat	17
2. Syarat perkawinan adat	21
3. Bentuk-bentuk perkawinan adat	22
4. Perempuan yang boleh dinikahi menurut adat	28
5. Macam-macam sistem perkawinan adat	29
B. Perkawinan menurut hukum Islam	
1. Pengertian perkawinan menurut Islam	30
2. Dasar hukum perkawinan	37
3. Syarat dan rukun perkawinan.....	42
4. Perempuan yang boleh dinikahi menurut Islam.....	44

**BAB III : PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA DI
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

A. Latar geografis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.....	50
B. Latar sosial, ekonomi budaya dan keagamaan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	51
C. Praktek perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	57

**BAB IV : ANALISIS PRAKTEK PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA
KELUARGA DI KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

A. Analisis praktek perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	65
B. Kajian hukum Islam tentang praktek perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	81

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Dari keterangan diatas tidak ditemukan tentang praktek perkawinan antar anggota keluarga, sehingga perkawinan antar anggota keluarga cenderung menjadi pertentangan dikalangan masyarakat kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Maka muncul pertanyaan bagaimana praktek dilapangan terjadinya perkawinan antar anggota keluarga dan bagaimana kajian dalam hukum Islam.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektifitas, bahwa ketika akan melakukan perkawinan harus dilihat dan diseleksi dengan siapa dia boleh menikah dan terlarang untuk menikah, untuk menjaga agar pernikahan yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang ada. Setelah penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan menelaah data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisanya secara deskriptif kualitatif yang kemudian ditemukan prinsip perkawinan antar anggota keluarga.

Faktor yang mendasari perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah karena harta, yang dalam istilah jawa sering disebut dengan *donyo ora keliyo*, *Ngumpulke balung pisah*, artinya dari pada harta jatuh ketangan orang lain lebih baik dengan saudara sendiri. Ini dimaksudkan agar bila harta jatuh ke tangan orang lain harta itu tidak dapat ditasarupkan dan hilang dengan sia-sia. Faktor yang lain disebabkan karena *ijbar* atau perjodohan dengan alasan bila kawin dengan anggota keluarga sendiri lebih mudah mengnali pasangan kita dan beradaptasi. Selain itu untuk menjaga tali silaturrahmi agar tidak putus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

² Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995, hlm. 56.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).⁴

Begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara khusus. Seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan lain-lain.

⁴ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998*, hlm. 74.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁵ Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Dalam hal larangan perkawinan, al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Perempuan itu adalah Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.⁶

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah (pertalian nasab), baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh

⁵ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004, hlm. 144.

⁶ Badriyah Fayumi, "Incest dan Perlindungan Perempuan", dalam *Swara Rahima*, No. 8 Tahun III Agustus 2003, hlm. 15. Lihat juga, Muhammad Bagiq al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002, hlm. 12-13.

ayah, diri sendiri atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.⁷

Sementara dalam kompilasi hukum Islam, masalah larangan perkawinan diatur dalam pasal 39-44.

Pasal 39 menyebutkan bahwa:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Tampaknya berkenaan dengan larangan perkawinan, baik yang termuat dalam fiqh, undang-undang maupun kompilasi hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang maupun KHI. Hal ini disebabkan karena masalah perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

⁷ *Ibid.*

Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Menurut anggapan, perkawinan bentuk ini merupakan pantangan atau larangan. Apabila pantangan itu dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal. Perkawinan antar saudara kandung juga dilarang. Bahkan bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok*, ini juga dilarang. Selain itu apabila calon isteri adalah anak saudara laki-laki ayah. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang*. Perkawinan jenis ini harus dihindari.⁸

Dalam adat masyarakat Batak, yang bersifat patrilineal dan bersendi “*dalihan natolu* (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan perkawinan. Jika pria Batak akan kawin harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula, begitu juga wanitanya. Sifat perkawinan demikian disebut *asymetris comnubium* di mana ada marga pemberi bibit wanita (*marga hula-hula*), ada marga dengan *sabutuha* (marga sendiri yang satu turunan) dan ada marga penerima wanita (*marga boru*). Antara ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan perkawinan tukar menukar (*ambil beri*).⁹

⁸ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 156.

⁹ Amiur Nuruddin, *op. cit.*, hlm. 144-145.

Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku *eksogami* suku dan *endogamy* kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam satu negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan. Perkawinan sesuku dianggap tidak baik karena itu berarti kawin seketurunan dan merupakan kejahatan daerah atau incest.¹⁰

Dalam masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, terdapat suatu perkawinan antar anggota keluarga. Perkawinan antar anggota keluarga terjadi, berdasarkan keterangan sementara dari masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, adalah karena alasan harta, dan ijbar atau perjudohan. Mereka takut apabila kawin dengan orang lain (tidak satu nasab), harta mereka akan dikuasai oleh orang lain. Mengenai alasan ijbar, mereka berpendapat untuk mempererat tali silaturahmi dan melanggengkan keturunan (biasanya keturunan priyayi atau bangsawan).

Fenomena tersebut menarik perhatian penulis, untuk meneliti lebih jauh. Karena baik dalam hukum Islam, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bentuk ini tidak diatur secara detail. Di dalam adat masyarakat Jawa, perkawinan antar anggota keluarga disebut perkawinan *corss causin* atau perkawinan antara anak saudara sekandung laki-laki dengan anak saudara sekandung perempuan.¹¹ Perkawinan cross causin menunjukkan adanya prinsip keturunan yang disebut bilineal, yang menghitung

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Purwadi, *op. cit.*, hlm. 156.

kekerabatan melalui orang laki-laki saja untuk sejumlah hak kewajiban tertentu dan melalui garis wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Fenomena perkawinan antar anggota keluarga, sebenarnya banyak terjadi di masyarakat, karena mereka menganggap dari pada menikah dengan orang lain, yang berbeda marga/keturunan, lebih baik dengan keluarga sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih mendalam tentang perkawinan bentuk ini terutama dari perspektif adat. Karena ada sebagian yang menyatakan bahwa perkawinan ini boleh dilakukan, ada juga yang mengatakan tidak boleh dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memberi judul: **“Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana praktek perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kajian Hukum Islam tentang praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek terjadinya perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian Hukum Islam tentang praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang prinsip perkawinan antar anggota keluarga belum banyak dilakukan. Penelitian tentang perkawinan yang penulis temukan adalah:

Musriyanto, dalam skripsinya meneliti tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi di Desa Banbagkerep Kecamatan Ngaliyan)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram. Hal ini menjawab mitos masyarakat bahwa melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram akan mengakibatkan celaka, dan setelah dilakukan penelitian ternyata tidak terbukti.¹²

Skripsi Widyawati Khoiriyah yang berjudul “Kontribusi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Perkawinan Nasional” membahas tentang transformasi nilai-nilai Islam yang aplikatif di Indonesia berlangsung melalui sosialisasi dan perkembangan nilai-nilai Islam. Pelembagaan ini menunjukkan bahwa nilai dan fitrah umat Islam dalam bidang keluarga dengan kewajiban

¹² Musriyanto, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi di Desa Banbagkerep Kecamatan Ngaliyan), Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2004.

bertakhhkim kepada syari'at Islam secara *sosiologis* dan *cultural* tidak pernah raib dan selalu hadir dalam kehidupan umat dan dalam sistem politik manapun.¹³

Dalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana Undang-Undang Perkawinan diwujudkan, terutama dalam kaitannya dengan Hukum Perkawinan Nasional. Karena Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud hukum baru, yang menambah khazanah Hukum Islam ke dalam Hukum Perkawinan Nasional.

Siti Munawaroh, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya membahas tentang “Analisis terhadap Nikah Massal bagi Masyarakat Kumpul Kebo (Studi di KUA Semarang Utara). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya praktek kumpul kebo. Dari penelusuran Munawaroh, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya kumpul kebo, yaitu: (1) Ekonomi, cukup untuk memenuhi hidup sehari-hari saja; (2) Buta hukum, masyarakat tidak mengenal Undang-Undang Perkawinan; (3) Perasaan terlanjur cinta yang mengakibatkan perempuan hamil lebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah; (4) Faktor lingkungan, yaitu terdapatnya prostitusi.¹⁴

Menurut Siti, nikah massal yang terjadi di Semarang Utara sangat diperlukan, karena kumpul kebo adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, nikah yang sah akan memperbaiki status sosial

¹³ Widyawati, *Kontribusi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Perkawinan Nasional*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2000.

¹⁴ Siti Munawaroh, *Analisis Terhadap Nikah Massal bagi Masyarakat Kumpul Kebo (Studi di KUA Semarang Utara)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2002.

mereka dalam masyarakat dan perubahan status mereka melalui nikah massal menjadikan mereka sebagai warga negara yang utuh. Dari segi hukum, nikah massal wajib dilaksanakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang rata-rata tidak mengetahui hukum dan undang-undang yang harus mentaati sebab bertujuan untuk kemaslahatan ummat.¹⁵

Karya ilmiah lain yang membahas tentang perkawinan adalah skripsi Endang Suprapti dengan judul “Kafa’ah dalam Perkawinan Pada Masyarakat Keturunan Arab Sayyid di Kampung Geni Kelurahan Dadapsari kecamatan Semarang Utara (Tinjauan Sosial Hukum Islam). Skripsi ini membahas tentang perkawinan yang terjadi antara Sayyid dengan calon mempelai perempuan.¹⁶

Dalam literatur-literatur fiqh klasik hampir seluruhnya membahas tentang konsep mahram atau wanita yang haram untuk dinikahi. Di antaranya: Imam Syafi’i dalam karyanya *al-Umm*, Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnahnya*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqh Lima Madzhab*, Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* dan masih banyak lagi karya-karya fiqh lain yang membahas tentang larangan pernikahan.

Selain literatur-literatur di atas, ada beberapa karya tentang larangan perkawinan di antaranya: Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam karyanya *al-Tanbih fii Fiqhi asy-Syafi’i*, Syeikh Mahmud Syaltut dalam *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, *al-Fatawa*, Imam al-Ghazali dalam karyanya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Endang Suprapti,

Adab an-Nikah, Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, juga membahas tentang larangan dalam pernikahan.

Dalam bentuk undang-undang aturan-aturan tentang larangan perkawinan juga diatur. Di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari semua karya yang telah disebutkan di atas, pembahasan tentang larangan pernikahan (konsep mahram), bersumber dari al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-23 yang menjelaskan tentang siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Tampaknya dari semua pembahasan tentang larangan perkawinan yang termuat di dalam fiqh, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*.

Prinsip Perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di masyarakat, ternyata tidak mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam,

maupun undang-undang, seperti perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah dilakukan, sehingga memerlukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat mengetahui bagaimana hukum Islam memandang perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan bagaimana prakteknya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

Dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis atau studi *law in action*. Karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini penulis gunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan

ganda, *kedua*, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹⁷ Dalam metode ini, penulis menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Observasi atau pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁸ Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati objek penelitian dengan menggunakan instrumen. Pengamatan dilakukan dengan mengamati atau mencermati perilaku masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁹ Sedangkan jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terfokus. Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2002, hlm. 5.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998, hlm. 146.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.V, 1994, hlm. 57.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari observasi langsung di lapangan, yaitu di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan wawancara dengan masyarakat yang melakukan perkawinan antar anggota keluarga, serta tokoh masyarakat setempat yang berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumentasi tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian yaitu, yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota keluarga.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dengan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena melalui sudut pandang sosial.²⁰ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota keluarga, bagaimana masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus memandang hal tersebut.

Dalam mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari premis-premis minor atau fakta - fakta khusus/empiris, kemudian fakta - fakta khusus

²⁰ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 245.

tersebut digeneralisasikan ke dalam premis umum atau dituangkan dalam sebuah teori baru. Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Dalam hal ini, penulis mengamati fenomena perkawinan antar anggota keluarga, yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi akan disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab Pertama : Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan. Sebagai landasan untuk menemukan faktor perkawinan antar anggota keluarga. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi, sehingga penulisan karya ilmiah ini dalam kajian hukum Islam akan diketahui secara jelas.

Bab Dua : Membahas perkawinan menurut hukum adat dan hukum Islam, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, macam-macam sistem perkawinan, kriteria perempuan yang boleh dinikahi.

Bab Tiga : Mengungkap tentang perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dalam bab ini juga dibahas latar geografis atau monografi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, latar sosial budaya dan keagamaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Dan untuk memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini dibahas tentang perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bab Empat : Merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Di dalamnya menganalisis tentang latar sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan yang menjadi pokok pembahasan yaitu analisis perkawinan antar anggota keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Bab Lima : Adalah bagian terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran dan penutup.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi

¹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 154.

berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.²

A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai “rites de passage” (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.³

Hubungan mereka setelah menjadi suami isteri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi.⁴ Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-isteri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami

² *Ibid*, hlm. 155.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984, hlm. 123.

⁴ Paguyuban atau organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi kecil yang dipimpin oleh suami atau ayah sebagai kepala keluarga.

dan isteri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.⁵

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat Jawa khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting. Selain harus jelas bibit, bebet, dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimurahkan rejekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orangtuanya, serta taat beribadah.⁶

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, hlm. 124.

⁶ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. X.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁷

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁸

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk)

⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 23.

dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.⁹

2. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.

⁹ *Ibid.*

- secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.¹⁰

b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).¹¹

c. Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.¹²

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

¹¹ *Ibid*, hlm. 35.

¹² *Ibid*.

- a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)
- b. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)
- c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)¹³

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.¹⁴ Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se clan atau se marga. Masyarakat yang masih konsekwen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu a simetri konubium yang merupakan larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga

¹³ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, hlm. 128.

walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.¹⁵

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami; matriloal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat.¹⁶ Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut (pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Baik perkawinan jujur maupun perkawinan semendo, keduanya memiliki akibat-akibat yang harus dijalani oleh suami dan isteri. Akibat dari perkawinan jujur adalah:

- a) Isteri keluar dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari keluarganya dan masuk pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab pada keluarga suami yang telah menjujurnya.
- b) Anak-anak yang dilahirkan menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan mewaris dari ayahnya.
- c) Kedudukan suami dan isteri sederajat.
- d) Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan masuk clan ayahnya.

Sementara perkawinan semendo berakibat pada:

- a) Anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya dan masuk clan ayahnya,
- b) Kedudukan suami dan isteri tidak sederajat.
- c) Pada kawin semendo sederajat, anak-anak tetap menarik garis keturunan ke atas melalui ayahnya, akan tetapi mereka dapat mewaris dari ayah maupun ibunya. Anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak kawin jujur dapat menjadi ahli waris.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29.

Berbeda dengan perkawinan jujur dan semendo, perkawinan bebas dapat dijumpai dalam masyarakat parental. Setelah terjadi perkawinan bebas, suami dan isteri tidak lagi memiliki satu keluarga tetapi dua keluarga sekaligus, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di pihak lain. Dan begitu seterusnya sampai anak-anak keturunannya.¹⁹

Selain tiga perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan adat lain yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.²⁰

Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Di Lampung, sebelum perkawinan dilangsungkan jika laki-laki berasal dari luar daerah, maka ia terlebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga “*kelama*” (kerabat pria saudara-saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat “*kenubi*” (bersaudara ibu). Jadi perempuan yang berasal dari luar, maka harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu ke dalam keluarga “*menulung*” (anak kemenakan dari saudara bapak yang perempuan) atau diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, hlm. 130.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hlm. 188.

“*kenubi*”. Sehingga perkawinan yang berlaku itu disebut *ngakuk menulung* (mengambil keluarga menulung) atau *kawin kenubi* (perkawinan dengan keluarga kenubi, bersaudara ibu).²¹

Dalam hal perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri, agar perkawinan itu sah maka salah satu harus mengalah memasuki agama suami atau agama isteri. Menurut agama Islam perkawinan campuran antar agama di mana calon suami isteri tidak bersedia meninggalkan agama yang dianutnya, maka Islam hanya membolehkan laki-laki Islam kawin dengan perempuan beragama lain. Jika sebaliknya suami beragama lain dari Islam sedangkan isteri beragama Islam dilarang.²²

Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 189.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hlm. 189.

4. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Adat

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.

Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat :

1. Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan senarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
2. Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
3. Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sita Aditya Bakti, 1992, hlm 38-39

5. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu.²⁵

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogamy ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.²⁶

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 131.

²⁶ *Ibid*, hlm. 132.

²⁷ *Ibid*.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.²⁸ Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.²⁹

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {49}

²⁸ *Ibid*, hlm. 132-133.

²⁹ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th., hlm. 270.

Artinya: “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat: 49)

Allah SWT juga berfirman dalam surat Yaa Siin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yaa Siin: 36)

Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri.³⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Dalam al-Qur'an, perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai 19 kali. Namun, kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. *Pertama*, kata nikah dapat berarti *aqd* (akad), sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat: 32:

³⁰ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX, 1998, hlm. 75.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلْهُمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {32}

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas, merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah³¹, demikian juga al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221 di bawah ini:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman ...” (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat di atas memperlihatkan bahwa laki-laki dilarang melangsungkan akad nikah dengan perempuan musyrik. Kedua, kata nikah dapat bermakna الوطء (hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang

³¹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diklat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002, hlm. 2.

membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh.

Ketiga, kata nikah juga dapat berarti *حلم* atau *الرشد* yang berarti umur baligh (usia dewasa)³², sebagaimana firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ...” (QS. An-Nisa’: 6)

Menurut Imam Syafi’i, yang dimaksud umur dewasa adalah 15 tahun. Nikah juga dapat bermakna akad dan semua akibatnya, yaitu biaya hidup dalam rumah tangga, atau paling tidak biaya akad nikah.

Dalam al-Qur'an perkawinan juga disebut dengan *تزوج*. Kata ini tidak banyak disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah harfiah, secara aktif terhadap perkawinan, melainkan sebagai “kata benda” yang pasif. Sehingga kata *زوج* (زوجا-يزوج)- زوج berarti jodoh atau kawan, seperti tersirat dalam surat ar-Rum ayat 21.

Kata tersebut di atas cukup banyak disebutkan dalam al-Qur'an dengan konotasi yang paling dominan adalah jodoh. Jumlah ayatnya tidak kurang dari 78 ayat yang tersebar di banyak surat. Bahkan jodoh itu digunakan sebagai fenomena umum baik makhluk manusia maupun

³² *Ibid*, hlm. 3.

lainnya sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Yaa Siin ayat 36 seperti disebutkan di atas.

Kata nikah dan *tazawwaj*, dalam ilmu fiqh disebut dengan kata *sharih* (denotatif), atau kata yang lazim dipakai oleh masyarakat muslim.³³

Dari segi bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat.³⁴

Sayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari'atkan Allah SWT.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.³⁶ Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁷

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk,

³³ *Ibid*, hlm. 5.

³⁴ Imam Taqiyuddin al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th., hlm. 36.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 7.

³⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 14.

³⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

mencium dan hubungan intim. *Kedua*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan *ketiga*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (sakinah).³⁸

Perkawinan dalam undang-undang diatur secara khusus, yaitu undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Dalam KUH Perdata dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh

³⁸ Masykuri Abdillah, *op. cit.*, hlm. 75.

³⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7.

diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung.⁴⁰

Berkaitan dengan takrif atau definisi nikah (perkawinan) di atas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di seluruh dunia Islam, yaitu: pertama, perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilangsungkan dalam bentuk akad atau kontrak. Dawoud el Alami dan Doreen Hinchliffe, menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya semua kontrak-kontrak yang lain, perkawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian suatu penerimaan (qabul) oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).⁴¹

Kedua, Dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam undang-undang perkawinan Indonesia (No. 1 Tahun 1974) disebutkan dalam anak kalimat “antara seorang pria dengan seorang wanita” atau “aqdun bayn ar-rajul wa al-mar’ah” dalam undang-undang perkawinan lain.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50-51.

⁴² *Ibid.*

Ketiga, tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau sakinah, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 “dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal” atau “to establish a bond a shared life and for procreation,” “with the object of the faming of a family and producing children,” dalam undang-undang perkawinan dunia Islam.⁴³

Perkawinan merupakan anjuran sebagai umat beragama, maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴⁴

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi

⁴³ *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁴ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan perkawinan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan perkawinan adalah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا {3}

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

لَا تَنَاقِحُوا تَنَاسُلًا كَثَرُوا فَإِنِّي مَبَاهُ بِكُمْ لَامَمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga karena banyak kaumku di hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.⁴⁵ Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud:⁴⁶

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ص.م. يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Kata-kata al-baat mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006, hlm. 44.

⁴⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992, hlm. 437.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 44.

تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط

(رواه البيهقي)

Artinya: “Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian; berkembangbiaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap para Nabi di hari kiamat.” (HR. Baihaqi)

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي (رواه

الطبراني)

Artinya: “Bila seorang hamba Allah telah kawin, sungguh telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengah lagi sisanya.” (HR. Tabrani)

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan dzahiri, menikah hukumnya wajib.⁴⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat para imam mazhab, maka hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan ‘*illat*’⁴⁹ hukum.

Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:⁵⁰

1. Wajib

⁴⁸ Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., hlm. 196.

⁴⁹ ‘*Illat*’ adalah suatu sifat yang terdapat pada *ashal* (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *ashal* dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya. Lihat Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996, cet. I, hlm. 83.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 12-14.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib bagi seseorang, sedangkan penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan perkawinan.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan. Untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan hanya beribadah. Oleh sebab itu para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan tidak mau menikah itu tidak termasuk ajaran Islam.

3. Mubah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Artinya, perkawinan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak kawin tidak akan berbuat zina dan andaikata kawin tidak akan menyia-nyaiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan ini dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran memenuhi kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya pihak isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

5. Haram

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan isterinya dan tidak mampu memberi nafkah. Dengan demikian, perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzalim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan disebutkan dalam pasal 2-10. Pasal 5 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dijamin kesahannya dan demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan yang dimaksud, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6).

Begitu juga dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila dicatat, sebagaimana undang-undang yang berlaku.⁵¹

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasid* (rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi *bathil* (batal).⁵² Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:⁵³

4. Calon mempelai pria, dengan syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak dapat halangan perkawinan

5. Calon mempelai wanita, dengan syarat:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan

⁵¹ Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁵² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th., hlm. 118.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000, hlm. 71-72.

- c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
6. Wali nikah, dengan syarat:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
7. Saksi nikah, dengan syarat:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
8. Ijab Qabul, dengan syarat:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

4. Perempuan yang Boleh Dinikahi Menurut Islam

Setelah mengetahui rukun dan syarat perkawinan, bagi seorang muslim yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan mendampingi nantinya. Hal ini penting untuk diperhatikan, agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinan kita.

Dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَّ يَدَاكَ »
(رواه البخارى)

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: “Dikawini perempuan karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya maka akan selamatlah engkau.” (HR. Bukhari).⁵⁴

Hadits di atas menjelaskan anjuran bagi seorang muslim apabila hendak mencari pasangannya. Ada 4 perkara yang harus diperhatikan

⁵⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *op. cit.*, hlm. 445.p

dalam memilih pasangan yaitu karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.

1. Karena Hartanya

Laki-laki baik dahulu maupun sekarang, menginginkan kawin dengan perempuan yang kaya. Padahal hal ini belum tentu berdampak positif. Karena orang yang mementingkan perkawinan karena mengharapkan harta kekayaannya semata dapat menjatuhkan harga dirinya. Lebih-lebih hal ini timbul dari pihak laki-laki, sebab akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dari kekayaannya.⁵⁵

Firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... {34}

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan dengan sebab sesuatu yang telah mereka (laki-laki) nafkahkan dari harta-hartanya.” (QS. An-Nisa’: 34)

Mengharapkan isteri yang kaya, hanya karena semata-mata ingin mengharap kekayaan, sungguh merupakan suatu pertimbangan yang jauh dari tuntunan baginda Rasul.⁵⁶

2. Karena keturunan atau kebangsawanannya

⁵⁵ Warno Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Surabaya: Insan Cendekia, cet. I, 1999, hlm. 39.

⁵⁶ *Ibid.*

Pandangan ini sungguh merupakan pandangan yang kurang mulia. Sebab dalam ajaran Islam, kemuliaan tidak terletak pada keturunan atau kebangsawanan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada-Nya⁵⁷, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {13}

Artinya: “Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang lebih taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.” (QS. Al-Hujurat: 13).

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa barangsiapa mengawini seorang perempuan karena kebansawanannya, niscaya tidak akan bertambah kebangsawannya kecuali mendapat hinaan.

Memilih calon isteri karena mengharap atau menginginkan kebangsawannya semata adalah suatu larangan. Karena kebangsawanan seseorang (suami-isteri) tidak mungkin berpindah kepada orang lain.

Dalam Islam dianjurkan agar kita memilih perempuan dari golongan keluarga yang baik-baik, yang kokoh dalam mengamalkan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 40.

ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, kelak dia akan dapat mendidik anak-anaknya secara baik sesuai tuntunan Rasulullah. Sebaliknya, jika memilih calon isteri yang tidak baik agamanya, sedangkan dia tidak shalat, tidak puasa, tidak suka membaca al-Qur'an, tidak mau membayar zakat dan ibadah-ibadah lainnya, maka dikhawatirkan didikan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak baik pula.⁵⁸

3. Karena kecantikannya

Seorang laki-laki apabila hendak menikah, dianjurkan untuk memilih calon isteri yang cantik. Hal ini penting, karena dapat menyenangkan suami yang akhirnya bermuara pada kepuasan rohani (seksual).

Dengan kecantikan biasanya dapat menyebabkan timbulnya keserasian dan kerukunan hidup suami isteri. Keduanya saling mencintai dan menyayangi. Sadar akan hal tersebut, nabi Muhammad SAW, mengajarkan kaum laki-laki yang akan menikah, hendaklah terlebih dahulu dilihat perempuan yang akan dinikahinya.⁵⁹

Nabi SAW bersabda, yang artinya “janganlah kamu mengawini perempuan itu karena ingin melihat kecantikannya, mungkin kedantikannya itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri, dan janganlah kamu mengawini mereka karena mengharap harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi nikahilah mereka dengan dasar agama. Dan

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 41.

⁵⁹ *Ibid*.

sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asal ia beragama.”⁶⁰

4. Karena agamanya

Pandangan ini merupakan pandangan yang paling tepat. Seseorang yang akan menentukan pilihan jodohnya bukan hanya karena harta kekayaannya, keturunan atau kebangsawanannya, kecantikannya. Tapi unsur yang paling penting adalah memilih istri yang beragama Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dia dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga.⁶¹

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Maka perempuan yang baik ialah yang taat kepada suami, serta memelihara diri di balik belakang suaminya sebagaimana Allah telah memeliharakan dirinya.” (QS. 4: 34)

Pengertian memelihara diri yang dimaksud dalam firman Allah itu adalah memelihara kehormatannya maupun kehormatan suaminya serta rahasia suami dan keluarganya, rahasia rumah tangganya dengan cara yang diwajibkan Allah.

Dalam perkawinan antar anggota keluarga yang mendasari terjadinya perkawinan ini adalah untuk menyambung tali silaturrahim antar kedua keluarga dan juga untuk menjaga kewibawaan dari kedua keluarga.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 42.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 43.

BAB III

PRAKTEK PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

A. Latar Geografis Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Kecamatan Kaliwungu terletak dalam ketinggian 17 m di atas permukaan laut. Adapun secara geografis letak Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut : Letak/batas wilayah Kecamatan Kaliwungu dibatasi oleh: Sebelah Utara : Kecamatan Gebog, Sebelah Timur : Kecamatan Kota dan Kecamatan Jati, Sebelah Selatan : Kecamatan Karanganyar, Demak dan Sebelah Barat : Kecamatan Mayong, Jepara¹. Adapun luas daerah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah 3.271.275 Ha.

Dalam struktur pemerintahan, Kecamatan Kaliwungu dipimpin oleh kepala kecamatan dan dibantu oleh pejabat-pejabat kecamatan lainnya, di antaranya sekretaris, bendahara dan beberapa seksi; seksi pemerintahan, Pol PP, Kesbanglinmas, Ekbang dan Kesmas.

Kecamatan Kaliwungu terdiri dari 15 desa dengan jumlah penduduk sebesar 82.183 yang terbagi dalam 40.471 laki-laki dan 41.712 perempuan. Adapun rincian luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:²

¹ Sumber Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah dalam Angka 2005, hlm. 1.

² *Ibid.*

Tabel 1

**Jumlah Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus**

No	Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
			Laki-laki	Perempuan	
1	Blimbing Kidul	125.110	2.257	2.363	36.928
2	Banget	180.692	1.975	1.964	21.800
3	Setrkolangan	187.863	1.007	1.066	11.035
4	Garung Kidul	261.166	1.430	1.511	11.261
5	Kedungdowo	308.227	4.505	4.477	29.141
6	Gamong	205.994	1.467	1.516	14.481
7	Sidorekso	289.504	2.853	2.834	19.644
8	Papringan	245.924	2.258	2.243	18.302
9	Kaliwungu	303.658	2.714	2.815	18.208
10	Mijen	235.538	4.437	4.631	38.499
11	Karangampel	174.120	2.482	2.593	29.147
12	Garung Lor	178.292	3.267	3.488	37.887
13	Prambatan Lor	256.316	4.086	4.239	32.479
14	Prambatan Kidul	180.886	2.907	3.096	33.187
15	Bakalan Krapyak	137.985	2.826	2.876	41.323
Jumlah		3.271.275	40.471	41.712	25.123

B. Latar Sosial Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kaliwungu sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta. Banyaknya industri-industri yang terdapat di Kecamatan Kaliwungu, mulai dari pabrik rokok,

industri rumah tangga (*home industry*) seperti usaha bordir, pembuatan krupuk, dan industri kecil lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kaliwungu lebih suka berwiraswasta.

Selain berwiraswasta, masyarakat Kecamatan Kaliwungu juga ada yang bermatapencaharian sebagai tani dan buruh tani. Sebagian besar tanah sawah mereka ditanami padi, ada juga yang diselingi dengan membuat batu bata. Masyarakat Kudus mempunyai julukan atau kebiasaan antara lain jika dipercaya memangku tugas dengan penuh tanggung jawab mereka akan melaksanakan, tapi sekali dikhianati maka kepercayaannya akan hilang sama sekali. Adapun ciri lain adalah kental penghayatan agamanya, menghormati ulama', gemar berwiraswasta, lebih mementingkan materi dari pada karir kepangkatan. Menjadi pegawai negeri di Kudus dipandang rendah dalam strata sosial masyarakat.

Ciri yang paling menonjol pada masyarakat Kudus dan sangat terkenal adalah sikap sangat hemat bahkan dikatakan pelit untuk urusan yang tidak prinsip seperti menjamu tamu, mentraktir teman, mengeluarkan uang untuk kepantasan dalam pergaulan. Tapi untuk membangun masjid, mendirikan madrasah, mereka tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan biaya besar. Kikir atau pelit sebagai tipe orang Kudus adalah tidak benar (kata Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Kudus, Bpk Djoko Rahardjo, BA).

Dari segi budaya masyarakat Kudus mempunyai tradisi-tradisi, diantaranya, ziarah ke tajug, tidak menyembelih sapi, dandangan, bulusan yang dinasabkan dengan kehidupan sunan Kudus. Sedangkan tradisi ziarah ke

gunung muria, tidak mengusik hutan jati masin, dinasabkan kepada sunan muria. Sedangkan tradisi buka luwur dinasabkan kepada keduanya.

Tradisi ini memberi pesan kepada masyarakat agar orang berpegang kepada syariat Islam secara menyeluruh, baik dalam hal ibadah (dalam hal ini diwakili dalam pesan sholat, puasa dan shodaqoh atau zakat) dalam mu'amalah (diwakili pada pesan perkawinan) dan dalam akhlaq (diwakili dalam pesan agar menjaga kelamin).³

Disamping itu penulis juga menemukan praktek perkawinan adat masyarakat kecamatan kaliwungu Kabupaten kudu yaitu pada tahap awal pasangan yang ingin mencari jodoh terlebih dahulu mengamati (nontoni) calon pasangannya. Setelah ada ketertarikan pihak keluarga pria datang ketempat wanita untuk “nakokke” atau menanyakan bahwa gadis yang dipilih sudah ada yang punya atau belum. Bila sudah ada kecocokan dan kesepahaman baru dilakukan proses “*lamaran*” yang mana disitu dibawakan hantaran berupa pakaian lengkap, alat kosmetik, buah-buahan, gembelong, jenang, wajik, beras, perhiasan, jajan pasar untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga, disamping itu juga ada pisang raja, daun sirih, dan gambir yang maksudnya bahwa jika mereka menikah akan menjumpai pahit getir kehidupan yang harus ditanggung bersama, dua buah batang tebu wulung yang biasa disebut dengan “*jondang*” yang melambangkan anteping kalbu (ketetapan hati), sepasang ayam yang dimaksudkan agar hubungannya

³ Drs. H Mundiri, *Upacara Tradisional Masyarakat Kudus*, Jurnal Penelitian IAIN Walisongo Semarang, edisi 10, 1998, hlm.17

langgeng sampai anak cucu. Adapun banyaknya bingkisan yang dibawa pada prosesi lamaran tergantung kemampuan masing-masing.

Dalam prosesi lamaran akan ditentukan hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan disamping itu dalam prosesi ini antar kedua keluarga di pertemuan dan saling berkenalan. Setelah disepakati hari dan tanggal kemudian dilakukan prosesi perkawinan. Untuk pelaksanaan ijab qabul biasanya dilakukan ditempat calon mempelai wanita. Dan setelah selesai dilaksanakan ijab qabul mempelai wanita diboyong menuju kerumah mempelai pria, kemudian mempelai wanita diserahkan terimakan kepada keluarga mempelai pria, biasanya pada saat itu sekalian dilakukan walimahan atau sering disebut dengan resepsi, namun hal itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan kedua belah pihak keluarga.

Setelah selesai rangkaian prosesi pernikahan masih ada prosesi yang harus dilaksanakan istilah jawanya *nyepasar* yaitu mengantarkan kedua mempelai ke rumah mempelai wanita hal ini dilakukan setelah 7 hari setelah dilakukan prosesi perkawinan.⁴

Dalam bidang keagamaan, masyarakat Kecamatan Kaliwungu mayoritas memeluk agama Islam, dan terdiri dari berbagai organisasi keagamaan. Nuansa Islami di Kecamatan Kaliwungu dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan yang diselenggarakan, baik di masjid-masjid,

⁴ Wawancara dengan Masrukin (Pembantu Penghulu Desa Prambatan Kidul) 3 Januari 2007

mushola-mushola, madrasah-madrasah dan beberapa kegiatan ritual keagamaan yang sebagian diselenggarakan di rumah penduduk.

Organisasi keagamaan yang cukup besar di Kecamatan Kaliwungu adalah NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Hampir 90% penduduk Kaliwungu tercatat sebagai warga Nahdlatul Ulama, sisanya tersebar di berbagai organisasi keagamaan yang lain.⁵ Baik NU maupun Muhammadiyah memiliki kegiatan keislaman sendiri-sendiri. Dalam mengembangkan organisasinya mereka juga mendirikan sarana pendidikan mulai dari tingkat dasar (MI/SD) sampai tingkat menengah (SMA, SMK, STM).

Beberapa kegiatan keislaman lainnya yang diselenggarakan di Kecamatan Kaliwungu, adalah didirikannya madrasah-madrasah dan pondok pesantren. Yang tujuannya tidak lain adalah mengajarkan ilmu agama Islam terhadap warga Kaliwungu khususnya dan umat Islam umumnya. Di antara ilmu yang diajarkan antara lain, baca tulis al-Qur'an, *fiqh*, *ushul fiqh*, *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, *mantiq*, *ilmu falaq* dan lain sebagainya.

Meskipun terbagi ke dalam berbagai organisasi keagamaan, namun dapat dikatakan bahwa mereka hidup berdampingan secara rukun dan damai serta tidak adanya fanatik yang berlebihan dari organisasi masing-masing, sehingga kehidupan beragama mereka dapat berjalan dengan sangat harmonis. Kerukunan agama di Kecamatan Kaliwungu betul-betul terpelihara, toleransi antar umat beragama juga sangat tinggi.

⁵ Wawancara dengan Muhammad Achid Arifudin al-Faqih, tanggal 04 September 2006.

Sedangkan untuk umat beragama yang lain, jumlah mereka sangat sedikit atau boleh dibilang minoritas, karena jumlah keseluruhan dari mereka sekitar 4% dari keseluruhan warga Kecamatan Kaliwungu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Desa di Kecamatan Kaliwungu⁶

Desa	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Jumlah
Blimbing Kidul	4.559	61	0	0	0	4.620
Banget	3.939	0	0	0	0	3.939
Setrokalangan	2.073	0	0	0	0	2.073
Garung Kidul	2.941	0	0	0	0	2.941
Kedungdowo	8.927	44	11	0	0	8.982
Gamong	2.983	0	0	0	0	2.983
Sidorekso	5.662	25	0	0	0	5.687
Papringan	4.501	0	0	0	0	4.501
Kaliwungu	5.525	0	4	0	0	5.529
Mijen	8.975	89	4	0	0	9.068
Karangampel	5.075	0	0	0	0	5.075
Garung Lor	6.603	66	67	0	19	6.755
Prambatan Lor	8.273	46	4	0	2	8.325
Prambatan Kidul	5.954	41	8	0	0	6.003
Bakalan Krapyak	5.579	111	12	0	0	5.703
Jumlah	81.569	483	110	0	21	82.183

⁶ Sumber Data dari Badan Pusat Statistik, *op. cit.* hlm. 32.

Tabel 3
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa
Di Kecamatan Kaliwungu Pada Akhir 2005⁷

Desa	Masjid	Langgar	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
Blimbing Kidul	1	2	0	0	0	3
Banget	2	6	0	0	0	8
Setrokalangan	3	1	0	0	0	4
Garung Kidul	2	7	0	0	0	9
Kedungdowo	5	13	1	0	0	19
Gamong	1	3	0	0	0	4
Sidorekso	3	7	0	0	0	10
Papringan	5	3	0	0	0	8
Kaliwungu	7	13	0	0	0	20
Mijen	6	13	0	0	0	19
Karangampel	5	14	0	0	0	19
Garung Lor	4	5	0	0	0	9
Prambatan Lor	4	8	0	0	0	12
Prambatan Kidul	3	7	0	0	0	10
Bakalan Krapyak	8	7	1	0	0	16
Jumlah	59	109	2	0	0	170

C. Praktek Perkawinan Antar Anggota Keluarga di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Setelah mengetahui latar geografis, sosial budaya dan keagamaan Kecamatan Kaliwungu, dalam subbab ini akan dikemukakan tentang dinamika

⁷ *Ibid*, hlm. 34.

perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu, yang merupakan inti pembahasan dari skripsi ini.

Perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kudus menarik perhatian penulis, karena dalam masyarakat Kaliwungu perkawinan semacam ini termasuk perkawinan yang “aneh”⁸.

Sebagai contoh kasus dari perkawinan ini adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh Zakariya Ahmad dengan Umi Hanik, salah satu warga Kecamatan Kaliwungu. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh, keduanya mengatakan bahwa pada awalnya memang perkawinan ini dilatarbelakangi oleh perjodohan oleh kedua orang tua mereka. Dimana orang tua mereka beralasan bahwa dari pada mencari orang yang belum tahu bibit, bobot, dan bebet, lebih baik yang sudah tahu sifat dan wataknya.

Awalnya Bapak Budiono menceritakan bahwa perjodohan itu sudah diinginkan oleh kedua keluarga, karena keluarganya menetap diluar Jawa dan jarang ketemu dengan anggota keluarga yang berada di Kudus, maka selain untuk menyambung tali silaturahmi yang sudah lama putus, kedua orang tua mereka berharap agar hubungan keluarga bisa kembali dekat.

Walaupun pada awalnya mereka sempat berfikir bahwa perkawinan mereka akan menjadi gunjingan banyak orang, tapi sebelum mereka melakukan perkawinan sudah berkonsultasi dulu dengan ulama’ setempat dan mengatakan tidak ada masalah yang penting tidak melanggar agama.

⁸ Tanda petik dari penulis. Aneh yang dimaksud adalah berbeda dengan kebiasaan umum masyarakat. Istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Kaliwungu adalah *koyo ora ono wong wedo liyo* (seperti tidak ada orang perempuan lain).

Bapak Budiono juga menceritakan bahwa Umi Hanik adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan dia adalah anak perempuan satu-satunya yang belum menikah, mereka khawatir nantinya anaknya akan menjadi perawan tua, dan pada saat itu Zakariya baru sakit hati karena ditinggal kekasihnya, maka diputuskan untuk segera menikahkan mereka yang pada saat itu Umi Hanik berumur 21 tahun dan Zakariya berumur 25 tahun.⁹

Walaupun berawal dari perjodohan pada akhirnya mereka juga bisa menerima dan saling mencintai. Umi Hanik mengungkapkan bahwa kalau dengan orang lain, harus mengetahui lebih dulu dan beradaptasi siapa pasangan yang cocok buat kita, sedangkan kalau dengan saudara sendiri kita sudah tahu bibit, bebet dan bobot-nya dan yang lebih penting kita sudah tahu sifat dari pasangan kita¹⁰.

Dapat penulis gambarkan bahwa antara Zakariya dan Umi Hanik masih memiliki hubungan keluarga dekat, diantara mereka masih ada hubungan darah karena masih satu kakek. Untuk lebih jelasnya penulis mencoba menggambarkan garis keturunan keluarga Umi Hanik dan keluarga Zakariya Ahmad seperti tabel dibawah ini.

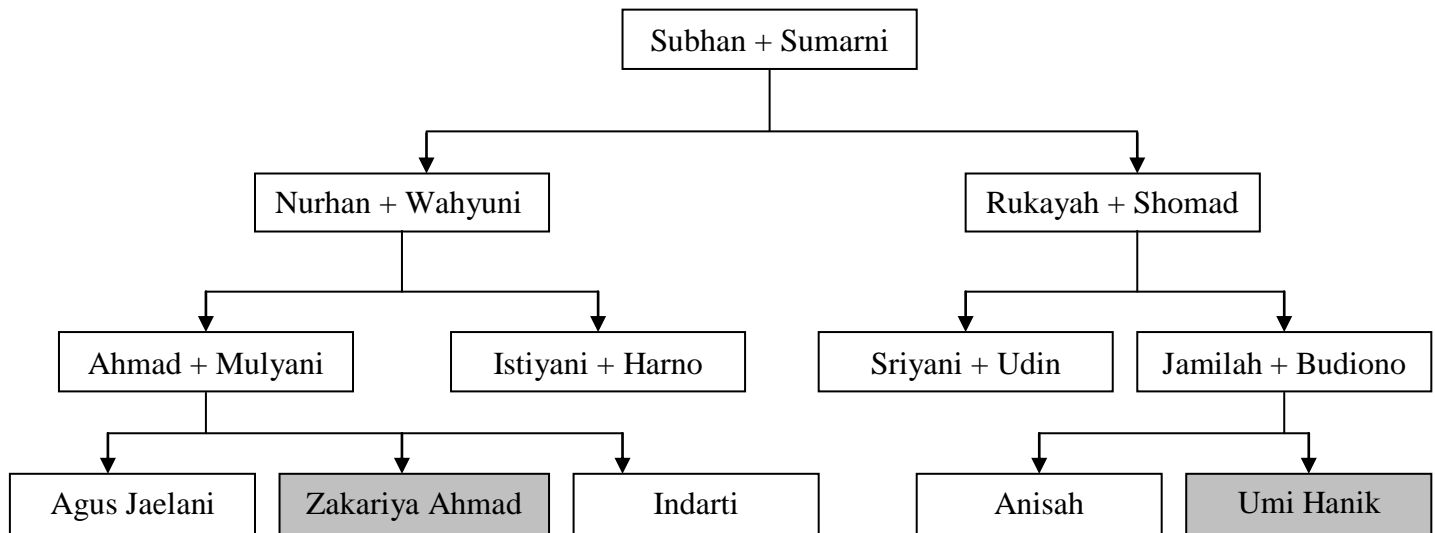
Tabel 4

Garis Keturunan Perkawinan Antar Anggota Keluarga¹¹

⁹ Waancara dengan Bapak Budiono, orang tua Umi Hanik

¹⁰ Wawancara dengan Zakariya Ahmad dan Umi Hanik, tanggal 25 Agustus 2006.

¹¹ Ibid



Di samping itu penulis juga menjumpai perkawinan antar anggota keluarga antara Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah yang keduanya juga masih ada hubungan saudara dekat, hanya saja mereka menikah tidak didasarkan atas perjodohan, melainkan karena suka sama suka.¹²

Awal mula pertemuan Khaidar dan Nurus Sa'adah biasa saja dan tidak ada perasaan suka, perasaan itu tumbuh saat Nurus Sa'adah mengikuti lomba rebana tingkat Kabupaten yang diadakan di Kecamatan Bae. Haidar mengatakan bahwa saat dia melihat perlombaan yang diikuti oleh Nurus Sa'adah yang pada saat itu sebagi vocalis dengan suara indahny, saat itulah Khaidar mulai tertarik dengan Nurus Sa'adah dan mencoba mendekatinya.

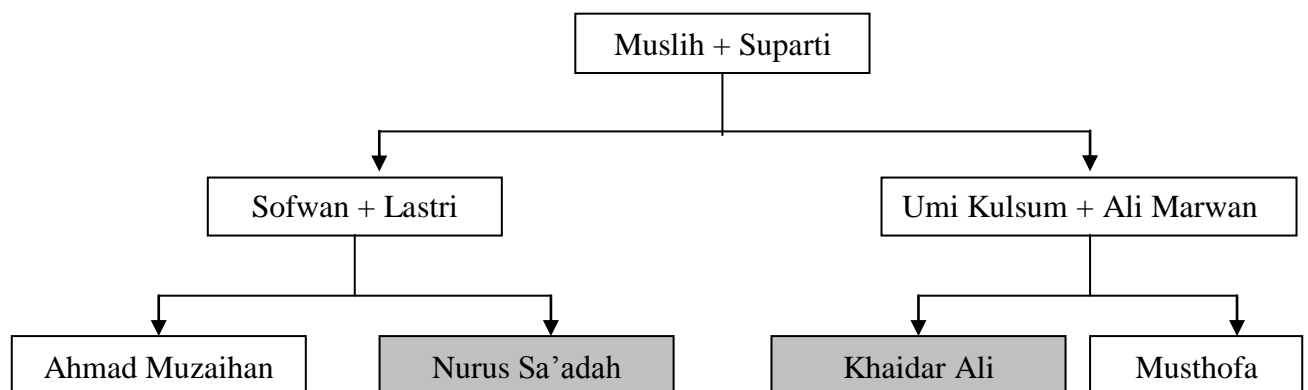
Ternyata setelah melalui proses pacaran, mereka sempat khawatir karena dia tahu bahwa diantara mereka berdua masih ada hubungan saudara sepupu. Dengan keyakinan yang besar maka Khaidar memberanikan diri

¹² Wawancara dengan Nurussa'adah, tanggal 25 Agustus 2006.

untuk menemui pamannya. Pada awalnya orang tua Nurus Sa'adah sempat terkejut dan tidak menyangka kalau diantara Khaidar dan Nurus Sa'adah telah pacaran, namun sebagai orang tua yang ingin anaknya bahagia akhirnya mereka mendapat restu dari kedua orang tuanya.

Bapak Sofwan ayah kandung dari Nurus Sa'adah membenarkan bahwa diantar mereka masih ada hubungan saudara sepupu. Namun dengan pertimbangan bahwa beliau sudah tua dan menginginkan seorang menantu yang bisa meneruskan bisnisnya berdagang di pasar kliwon dan juga beliau bersyukur kalau menantunya adalah keponakannya sendiri sehingga harta kekayaannya tidak akan jatuh ketangan orang lain.¹³

Sebelum melangsungkan pernikahan mereka berdua sempat mendapatkan tantangan dari masyarakat, karena menurut anggapan masyarakat bahwa mereka masih saudara dekat dan itu tidak boleh di nikahkan. Namun setelah mereka berdua meminta pendapat kepada KUA ternyata mereka diperbolehkan untuk menikah, karena agama tidak melarang orang yang menikahi saudara sepupu. Dapat penulis gambarkan skema garis keturunan keduanya sebagai berikut :



¹³ Wawancara dengan bapak Sofwan, orang tua Nurus Sa'adah.

Menurut Bapak Faqih, ulama masyarakat Kecamatan Kaliwungu yang sekaligus mantan Hakim Pengadilan Agama Kudus mengemukakan bahwa perkawinan antar anggota keluarga biasanya diistilahkan dengan *misanan* atau *tunggal mbah* (satu kakek), seperti anak Pak De dengan anak paman atau bibi. Ia juga mengistilahkan perkawinan ini dengan “*donyo orang keliyo, ngumpulke balung pisah* (dari pada harta keluarga pindah ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri)”.

Menurut beliau perkawinan antar anggota keluarga ada yang berbau ijbar atau perjudohan. Dalam Islam, perkawinan ijbar dari ayah atau kakek diperbolehkan. Karena tidak selamanya ijbar itu jelek. Akan tetapi apakah ijbar masih cocok apabila diaplikasikan di zaman modern seperti sekarang ini? Perjudohan bagi anak-anak muda sekarang sudah tidak cocok lagi diterapkan, mereka sudah bisa memilih pasangannya masing-masing dengan alasan ini bukan zamannya Siti Nurbaya lagi.

Perkawinan antar anggota keluarga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkawinan ini adalah apabila perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang memiliki golongan darah biru (bangsawan/priyayi), keturunan mereka justru memiliki otak yang brilian atau bisa disebut dengan “bibit unggul”. Jadi, tidak benar bahwa perkawinan antar anggota keluarga itu akan mengakibatkan cacat fisik terhadap keturunan mereka.

Sedangkan dampak negatifnya kita bisa melihat apabila dalam keluarga tersebut terjadi *broken home*, yang mengakibatkan perceraian, maka

secara otomatis kedua keluarga hubungannya akan putus. Sementara menurut orang Jawa perkawinan itu bukan hanya membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warrahmah* tetapi lebih dari itu, menyatukan dua keluarga yang berbeda.¹⁴

Bapak Eko, salah satu pegawai Kecamatan Kaliwungu, mengungkapkan bahwa perkawinan antar anggota keluarga itu boleh-boleh saja dilaksanakan, selama itu diperbolehkan oleh hukum Islam dan tidak melanggar nash. Perkawinan ini biasanya banyak terjadi di pedesaan, mereka beranggapan bahwa kawin dengan saudara sendiri termasuk saudara sepupu itu lebih baik daripada dengan orang lain, karena kita sudah tahu bibit, bebet, bobot-nya.¹⁵

Sebagaimana yang dikemukakan Bapak Faqih, Bapak Eko juga mengatakan bahwa kebanyakan perkawinan saudara sepupu adalah bentuk dari perjodohan. Orang tua menjodohkan anaknya dengan saudara sendiri dengan menawari si anak, dan menggambarkan bagaimana ciri-ciri pasangan yang akan dijodohkan tersebut. Apabila si anak setuju, maka dilaksanakanlah perkawinan tersebut.

Menurut Bapak Eko, perkawinan antar anggota keluarga juga memiliki dampak positif dan negatif. Sebagai dampak positif dari perkawinan ini adalah terjalinnya tali silaturahmi yang begitu kuat dan erat. Sedangkan dampak negatifnya adalah apabila terjadi perceraian, maka keluarga akan putus, tali silaturahmi hancur meskipun itu dengan saudara sendiri.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Faqih, tanggal 28 Agustus 2006.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Eko Tachwoyo, tanggal 28 Agustus 2006.

Sementara itu, opini yang berkembang di masyarakat Kecamatan Kaliwungu, perkawinan ini dilatarbelakangi karena harta dan perijodohan orang tua. Menurut mereka bahwa agar harta yang kita miliki tidak jatuh ke tangan orang lain, maka perkawinan antar anggota keluarga itu lebih baik, dari pada dengan orang lain. Namun demikian, perkawinan ini justru dapat mendatangkan malapetaka, karena apabila sampai terjadi perceraian, maka tali silaturahmi akan putus dan apabila sang suami menang, maka orang tua dilupakan. Hal ini, yang dilarang oleh hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar warga Kecamatan Kaliwungu tidak setuju prinsip perkawinan antar anggota keluarga dilaksanakan. Karena meskipun memiliki dampak positif, tetapi dampak negatif atau akibat buruk yang timbul dari perkawinan ini lebih besar.

BAB IV

ANALISIS PERKAWINAN ANTAR ANGGOTA KELUARGA DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

A. Analisis Praktek Perkawinan Antar Anggota Keluarga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, ramah, tanpa banyak basa-basi, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, termasuk dengan penulis yang sedang mengadakan penelitian di kecamatan ini.

Fenomena sosial tersebut ternyata cukup banyak membantu penulis dalam melaksanakan tugas penelitian. Sikap keterbukaan inilah yang memudahkan proses komunikasi penulis, sehingga dari sejumlah responden yang diwawancarai, tampak tidak merasa terganggu dengan kegiatan penelitian ini. Kondisi responden yang banyak mempunyai waktu luang, tidak mempunyai kesibukan yang padat inilah yang mungkin membuat mereka merasa tidak terganggu. Pada akhirnya penelitian dapat berjalan dengan lancar, meskipun ada sedikit hambatan itu bukan dari responden, tetapi justru dari penulis sendiri.

Masyarakat Kecamatan Kaliwungu, seperti dijelaskan pada bab sebelumnya termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam

persoalan agama. Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut.¹ Sehingga prinsip perkawinan antar anggota keluarga yang dipertentangkan oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum Islam karena sebetulnya tidak ada larangan dalam agama.

Demikian, yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Kelestarian budaya dan pranata-pranata sosial, betul-betul dijaga. Terlebih dalam hal agama, masyarakat Kecamatan Kaliwungu termasuk taat beribadah. Pola keberagamaan masyarakat Kaliwungu, mampu mengkombinasikan

¹ Cik Hasan Bisri, "Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 39 tahun IX, 1998, hlm. 70.

antara budaya lokal dan budaya Islam. Ritual-ritual keagamaan, seperti pengajian, yasinan, tahlilan dan lain-lain yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang masih dilestarikan.

Pranata semacam ini, berdampak pada sikap mereka yang begitu perhatian terhadap hukum yang apabila diaplikasikan dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk dalam hal praktek perkawinan antar anggota keluarga. Meskipun secara hukum Islam tidak melarang perkawinan seperti ini, tetapi karena dikhawatirkan justru menimbulkan kehancuran keluarga, maka masyarakat Kecamatan Kaliwungu cenderung tidak sepakat dengan perkawinan tersebut. Apalagi yang dijadikan alasan oleh mereka, adalah karena harta.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa, perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu tidak lain adalah bentuk pranata sosial masyarakat ketika berinteraksi dengan hukum Islam. Sehingga kepedulian masyarakat Kecamatan Kaliwungu terhadap hukum begitu kuat dan mengakar. Bentuk pranata tersebut juga terjadi dalam perkawinan antar anggota keluarga Zakariya dengan Umi Hanik dan Khaidar Ali dengan Nur Sa'adah.

Apabila kita cermati, prinsip perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kaliwungu disebabkan oleh beberapa faktor, contoh saja faktor ijbar atau perjodohan. Perkawinan antara Zakariya dengan Umi Hanik yang mulanya mereka tidak ada keinginan untuk saling menikah, namun karena paksaan dari orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah karena

takut kalau anaknya jadi perawan tua, dan untuk menjaga putusnya hubungan silaturrahi antar keluarga yang tadinya sudah berjauhan karena keluarga Umi Hanik yang berdomisili diluar jawa padahal mereka berasal dari kudu dan masih saudara yang berasal dari satu kakek.

Adapun yang berhubungan dengan faktor harta yaitu perkawinan antar Khaidar Ali dengan Nur Sa'adah merupakan bentuk dari kekhawatiran atau ketakutan terhadap harta bendanya. Mereka takut harta bendanya akan jatuh ke tangan orang lain, meskipun pada awalnya perkawinan mereka tidak didasari perjodohan melainkan karena suka sama suka, namun pada akhirnya kedua orang tuanya menyetujui dengan alasan agar harta benda yang sudah dikumpulkan tidak jatuh ketangan orang lain, dan nantinya harta itu tidak dapat ditasyarufkan dengan baik.

B. Kajian Hukum Islam Tentang Praktek Perkawinan Antar Anggota Keluarga Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu, setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.²

² Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003, hlm. 120.

Syeikh Mahmud Syaltut, pemikir hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.³

Pendapat Syaltut di atas, menginformasikan bahwa betapa pentingnya perkawinan, maka sebagai umat Islam sudah sewajarnya apabila kita harus memiliki perhatian khusus terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan. Karena tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah warahmah*, serta kekal abadi. Dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang sekiranya dapat merusak hubungan perkawinan, maka perlu diperhatikan secara khusus dan dicari jalan keluarnya, seperti halnya perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Perkawinan Zakariya Ahmad dengan Umi Hanik dan Khaidar Ali dengan Nur Sa'adah, warga Kecamatan Kaliwungu merupakan contoh perkawinan yang terjadi antar anggota keluarga. Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam, perkawinan jenis ini diperbolehkan, karena saudara satu kakek

³ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980, hlm. 141.

maupun saudara sepupu bukan termasuk dalam kategori *mahram* (perempuan yang haram untuk dinikahi). Namun dilihat dari hukum adat, perkawinan seperti ini menimbulkan pro dan kontra, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang,⁴ salah satunya yang terdapat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Pendapat yang mendukung perkawinan antar anggota keluarga, mengistilahkan dengan pepatah jawa yang menyatakan bahwa *donyo ora keliyo, ngumpulke balung pisah* (daripada harta jatuh ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri). Perkawinan seperti ini juga dapat mengeratkan tali silaturahmi keluarga, karena selain masih ada hubungan saudara, untuk beradaptasi lebih mudah dan kebiasaan-kebiasaan pasangan sudah kita ketahui.

Sementara yang kontra, berargumen bahwa justru perkawinan antar anggota keluarga bisa menimbulkan putusnya tali silaturahmi apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Perkawinan ini juga bisa menimbulkan terputusnya tali persaudaraan apabila terjadi perceraian, meskipun sebuah perceraian tidak diinginkan. Selain itu, dalam budaya jawa dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh keturunan. Tetapi, lebih dari itu yaitu memadukan atau menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

⁴ Dalam adat Jawa, secara umum tidak menyetujui perkawinan antara pria dengan saudara sepupu ayahnya, pria dengan saudara perempuan ayah atau ibunya. Lihat Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 39.

Pendapat yang pro maupun yang kontra di atas, masing-masing memiliki kebenaran tersendiri. Dengan kata lain, argumentasi tersebut dapat dikategorikan sebagai dampak positif dan negatif. Yang menjadi persoalan di sini menurut penulis adalah, upaya untuk mempertahankan harta keluarga agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Dengan istilah *donyo ora keliyo*, dan *ngumpulke balung pisah*, di satu sisi memang baik, karena keluarga kita akan lebih terjamin dengan harta tersebut. Tetapi di sisi yang lain, kita seolah-olah menganggap bahwa orang lain yang akan jadi pasangan kita bukan orang yang baik/jahat yang nantinya hanya akan menghabiskan harta bendanya.

Dalam bab sebelumnya telah diungkapkan bahwa, perkawinan antara Zakariya dan istrinya bisa terjadi, bukan atas dasar suka sama suka pada awalnya melainkan atas dasar perjodohan. Akan tetapi, rasa suka itu datang justru setelah mereka melangsungkan perkawinan. Keduanya mengungkapkan bahwa perkawinannya terjadi karena untuk menyambung hubungan keluarga yang terpisah disebabkan karena keluarga Umi Hanik berdomisili diluar Jawa.

Pasangan perkawinan antar anggota keluarga juga dialami oleh Khaidar Ali dengan Nurus Sa'adah. Meskipun pada awalnya mereka melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka namun menurut orang tua mereka perkawinan dengan saudara akan memelihara harta kita agar tidak jatuh ke tangan orang lain, yang dikhawatirkan akan menghabiskan kekayaan mereka.

Dua kasus di atas, merupakan fenomena baru, karena perkawinan antar anggota keluarga menurut kebiasaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, adalah sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Opini masyarakat yang muncul akibat adanya perkawinan antar anggota keluarga adalah cenderung tidak menyetujui, tetapi bukan berarti melarang. Istilah yang sering digunakan adalah *ora ilok* (tidak pantas).

Dalam hukum Islam, perkawinan antar anggota keluarga memang tidak dilarang, tetapi penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam hubungan kekeluargaan. Anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi dan menjauhi kemungkinan sesusuan (ketika kecil disusukan oleh ibu yang sama) selain hikmah lainnya seperti faktor kesehatan atau memperluas kekeluargaan dan lain-lain.⁵

Di dalam Pasal 8 Undang-undang perkawinan menyebutkan tentang larangan perkawinan dilangsungkan, yaitu:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

⁵ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm. 17.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”⁶

Pada dasarnya hukum memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam hidup bersama, meski di sisi lain hukum lalu akan berarti dibatasinya hak-hak individu dan membuat orang harus mengompromikan kepentingan-kepentingannya. Bisa dikatakan pula bahwa ada reduksi keadilan dalam rumusan hukum. Kepentingan tersebut, bisa dalam bentuk kepentingan ekonomis, politis, budaya bahkan kepentingan religius.⁷

Demikian juga dengan hukum adat, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh adat atau masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat mengikat.⁸

Sependapat dengan Van Vollenhoven, Prof. Holleman mengatakan bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh para warganya.⁹

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8.

⁷ Al. Andang L. Binawan, “Penyempitan Kebebasan Beragama” dalam BASIS, Nomor 01-02 Tahun ke-53, 2004, hlm. 24.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984, hlm. 19.

⁹ *Ibid*, hlm. 20.

Dalam Islam, syari'ah atau hukum Islam merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (Syari') di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu.¹⁰ Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah:

العادة محكمة

Artinya: “Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹¹

Dalam kaidah fiqh yang lain juga disebutkan:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Artinya: “Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan tempat (situasi dan kondisi).”¹²

Kaidah berasal dari hadits Nabi SAW, apabila orang muslim menganggap baik, maka disisi Allah itu juga merupakan sebuah kebaikan. Perlu diketahui di sini bahwa sesungguhnya perumpamaan adat atau kebiasaan itu yang dibuat dasar dalam ilmu fiqh, karena kebanyakan yang ada dalam fiqh itu diambil dari adat kebiasaan seperti adanya haid, baligh dan lain-lain.¹³

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum Islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi. Sehingga apabila ada kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan oleh

¹⁰ Ilyas Supena, “Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)” dalam Justisia, Edisi 20 tahun X, 2002, hlm. 66.

¹¹ Jalaluddin Suyuthi, *al-Asybah wa Nadha'ir*, Semarang: t.tp., t.th, hlm. 63.

¹² *Ibid*, hlm. 65.

¹³ *Ibid*.

masyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadits).

Kembali pada praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, apabila kita cermati, ternyata yang menjadi alasan atau dasar utama adalah agar hubungan keluarga yang terpisah tidak putus dan alasan agar harta mereka tidak jatuh ke tangan orang lain, bukan membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warahmah* serta kekal dan abadi, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Padahal apabila kita pahami betul arti penting perkawinan adalah untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia dengan keturunannya.

Pemilihan pasangan hidup yang tepat merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang tumpungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena inipun sementara, tetapi bersandar pada iman kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Dalam hadits Nabi SAW, memang dijelaskan bahwa salah satu kriteria memilih pasangan hidup adalah harus melihat empat hal yaitu karena

¹⁴ Ahmad Izzudin, "Nikah Beda Agama" dalam Justisia, Edisi 25 tahun XI, 2004, hlm. 60.

hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Apabila kita memahami secara tekstual hadits tersebut, mungkin kita akan berpendapat bahwa harta kekayaan bukannya salah satu kriteria memilih pasangan. Jadi, praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sangat beralasan.

Menurut penulis, maksud dari empat kriteria tersebut tidaklah demikian, pemilihan harta sebagai salah satu kriteria dalam memilih pasangan adalah untuk mengetahui apakah calon pasangan hidup kita itu mampu mengelola harta dengan baik. Dengan kata lain, apakah ia gemar bersedekah, mengeluarkan zakat, menolong fakir miskin atau justru sebaliknya ia pelit dan kikir, tidak mau bersedekah maupun zakat, tidak memahami bahwa sebenarnya harta hanya titipan dari Allah SWT, yang pada akhirnya akan kembali ke sisi-Nya.

Sedangkan karena faktor ijbar atau perjodohan, dimaksudkan agar tidak terputusnya tali silaturrohmah yang telah terjalin dengan baik. Demikian juga dengan kecantikan, hal ini dimaksudkan agar kita hati-hati menilai seseorang, dengan kecantikan yang dimiliki, mampukah ia menjaga dan merawatnya dengan baik, terutama dari pandangan yang dapat menimbulkan maksiat.

Sementara yang terakhir, adalah karena agamanya. Di atas telah disebutkan bahwa pondasi bangunan kita harus kuat, karena pernikahan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami isteri dan anak-anaknya. Apabila pasangan suami isteri itu

seagama atau satu keyakinan, maka mereka akan dengan mudah memelihara dan melestarikannya. Inilah mengapa agama begitu penting dalam sebuah perkawinan.

Selain itu, penulis juga sepakat dengan ungkapan Bapak Faqih, warga Kecamatan Kaliwungu, bahwa perkawinan antar anggota keluarga cenderung kepada ijbar atau perjodohan – seperti yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Namun apakah di zaman sekarang bentuk semacam ini masih relevan untuk diterapkan? zaman sekarang ini para pemuda-pemudi lebih suka memilih pasangan hidupnya sendiri, karena dengan begitu mereka dengan leluasa dapat mengetahui asal-usul, sifat atau tingkah laku calon pasangan hidup kita.

Lebih dari itu, perkawinan antar anggota keluarga meskipun ada dampak positifnya, seperti mudah untuk menyambungkan tali silaturahmi keluarga, namun menurut penulis dampak negatifnya justru lebih banyak, ketika kita mengalami perselisihan, maka akibatnya justru bisa menghancurkan jalinan hubungan persaudaraan, yang bukan hanya milik suami-isteri tetapi dua keluarga mereka dan seterusnya. Apalagi berbicara persoalan harta, apabila kita tidak bisa menjaga dan memenej harta itu dengan baik, atau bahkan menghambur-hamburkannya, maka itu akan berakibat fatal.

Dalam hukum adat, istilah yang sering digunakan untuk mengetahui pasangan hidup ada 3 yaitu bibit, bebet, dan bobot. Bibit artinya asal-usul. Maksudnya, calon pasangan itu anak-cucu siapa, mereka sehat jasmani-rohani

atau tidak, berasal dari mana, dari keluarga baik-baik apa tidak dan sebagainya. Bobot artinya berat atau kualitas. Hal ini lebih menyangkut pada kualitas si calon pasangan itu sendiri, terutama calon mempelai pria. Misalnya, pendidikan si calon sampai di mana, pekerjaannya apa, sikap serta keimanannya bagaimana dan sebagainya. Sedangkan bebet artinya bobot atau kualitas perilaku orang tua calon mempelai. Maksudnya, bagaimana perilaku keseharian kedua orang tua calon mempelai, agama atau budi pekertinya, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan bahwa bagaimana pun anak itu adalah keturunan dari kedua orangtua mereka, sehingga watak dan keseharian orang tua akan sangat berpengaruh pada anak-anak mereka.¹⁵

Ketiga konsep di atas, tidak lain agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang berkualitas dan patuh kepada kedua orang tua, serta taat beribadah. Jadi, tidak dibenarkan apabila perkawinan dilangsungkan hanya atas dasar agar hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain, meskipun baik dari segi bibit, maupun bobotnya memadai. Karena bukan persoalan harta itu jatuh ke tangan orang lain, tetapi bagaimana menjaga dan memelihara itu agar bisa dimanfaatkan dengan baik dan ditasyarufkan untuk kebaikan, menolong fakir miskin dan sebagainya.

¹⁵ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Di dalam adat masyarakat Jawa, perkawinan antar anggota keluarga disebut perkawinan corss causin atau perkawinan antar anak saudara sekandung laki – laki dengan anak saudara sekandung perempuan, yang menunjukkan prinsip keturunan bilineal yang menghitung kekerabatan melalui orang laki – laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu dan melalui garis wanita untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Orang Jawa mengistilahkan dengan misanan atau tunggal mbah (satu kakek), seperti anak Pak De dengan anak Paman atau Bibi.

Praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus disebabkan oleh faktor ijbar atau perjodohan yang biasanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan. Dan alasan lain yaitu harta agar tidak jatuh ketangan orang lain karena mereka takut apabila kawin dengan orang lain (tidak satu nasab) harta mereka akan hilang sia – sia. Istilah yang digunakan adalah *donyo ora keliyo, ngumpulke balong pisah* (dari pada harta keluarga jatuh ketangan orang lain lebih baik dengan saudara sendiri).

2. Menurut hukum Islam perkawinan antar anggota keluarga bukan larangan dalam perkawinan. Secara umum perkawinan yang dilarang menurut Islam adalah: perkawinan dengan mahramnya, yaitu : ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Sebagian besar warga Kecamatan Kaliwungu tidak setuju perkawinan antar keluarga dilaksanakan karena dampak negatif atau akibat buruk yang terjadi karena perkawinan antar anggota keluarga adalah putusnya tali silaturahmi maka perkawinan ini harus dipikirkan masak – masak.

B. Saran-saran

Perkawinan merupakan satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut keharmonisan dan kekekalan antara suami isteri, maka memilih pasangan hidup yang cocok dan tidak melanggar aturan hukum Islam maupun adat adalah keniscayaan. Dengan demikian, upaya-upaya yang perlu diperhatikan adalah:

1. Mengetahui betul apakah pasangan hidup kita termasuk dalam kategori *mahram* (yang haram untuk dinikahi), apabila sampai terjadi demikian, maka bukan hanya perkawinan kita putus atau batal tetapi dikhawatirkan jalinan silaturahmi juga ikut putus. Karena, perkawinan bagaikan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan

batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh.

2. Upaya fungsionalisasi agama (Islam) bagi individu dan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat secara sadar dapat menghargai pranata perkawinan serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selain itu, adanya kejelian dan perhatian khusus apakah yang kita lakukan menyimpang dari garis hukum Islam maupun hukum adat. Karena bukan hanya hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan tetapi adat kebiasaan suatu masyarakat yang telah mengakar, juga dapat dijadikan hukum yang bersifat mengikat.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Wallahu A'lam Bi Al-Shawwab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX* 1998.
- Abdillah, Masykuri, "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam *Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*, 1998.
- Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. X.
- Ahnan, Mahtuf, dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th..
- al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.th..
- al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV, t.th.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998.
- Bagiq al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua)*, Bandung: Mizan Media Utama, cet. I, 2002.
- Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah dalam Angka 2005.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, Diktat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002.

- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.V, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hamid, Warno, *Merajut Perkawinan Harmonis*, Surabaya: Insan Cendekia, cet. I, 1999.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992.
- J. Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2002.
- Musriyanto, *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram Menurut Adat Jawa (Studi di Desa Banbagkerep Kecamatan Ngaliyan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2004.
- Mundiri, *Upacara Tradisional Masyarakat Kudus, Jurnal Penelitian IAIN Walisongo Semarang*, Semarang, Edisi 10, 1998.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I, 1995.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t..
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th..
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

Subekti R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. XIX, 1978.

Swara Rahima, No. 8 Tahun III Agustus 2003.

Salam Arief, Abd., *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Realita dan Fakta Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984.

Yahya, Mukhtar, dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996, cet. I.